

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Peran**

Kata peran sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran. Teori peran sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Meski Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh budaya.

Menurut Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Menurut Biddle dan Thomas, Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam

keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Menurut Olson dan Downs partisipasi dalam peranan ditentukan berdasarkan keinginan sendiri dan rasionalitas masing-masing individu. Tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Olson (1971) dan Downs (1957).

Linton menyatakan Peran adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Soekamto : 1982 mendefinisikan peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut peneliti sendiri peran adalah pemberian tugas yang diberikan masyarakat terhadap individu/kelompok dengan melihat latar belakang objek yang diberi peran. Seperti latar belakang perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) maka dibedakan karakternya, perannya, statusnya, fungsinya dan tanggung jawabnya. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki cenderung diberikan peran maskulin sedangkan yang berjenis kelamin perempuan cenderung akan diberikan peran feminim.

## B. Tinjauan tentang Politik

Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan *master of science*.<sup>8</sup> Maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan (*scientific*), tetapi ia menganggap, pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia.

Bagi Aristoteles, politik berarti mengatur apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Lasswell merumuskan politik sebagai “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Sejak awal hingga perkembangannya yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

---

<sup>8</sup> H. Victor Wiseman. 1969. *Politics : Master of Science*. London: Routledge & Kegan Paul.

## 1. Klasik

Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Filosof ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat (swasta). Pada hemat Aristoteles, urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta.

Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam *polis*.<sup>9</sup> Hanya dalam polis itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena disana urusan-urusan yang berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatan, dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Di luar *polis* manusia dipandang sebagai makhluk yang berderajat dibawah manusia seperti binatang atau sebagai makhluk yang berderajat diatas manusia seperti Dewa atau Tuhan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota pada zaman Yunani Kuno.

<sup>10</sup> Aristotle., 1972. *The Politics*. Bungay, Suffolk: The Chausser Press. Hlm. 28.

## 2. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.<sup>11</sup> Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antar kelompok di dalam suatu negara.

## 3. Kekuasaan

Pandangan ketiga melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini. Dirumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkung, dan hasil-hasil kekuasaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Gerth dan Wright Mills, (Eds.). 1961. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Routledge & Kegan Paul Ltd. Hlm. 78.

<sup>12</sup> William Robson. 1954. *The University Teaching of Social Sciences: Political Science*. Paris: UNESCO. Hlm. 17-18.

#### 4. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menyimpang dari pandangan kelembagaan diatas, dewasa ini para ilmuwan politik memandang politik dari kaca mata fungsional. Politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Diantara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah Easton dan Lasswell.

Easton merumuskan politik sebagai *The authoritative allocation of values for a society*,<sup>13</sup> atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Sementara Lasswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah *Who gets, what, when, how*<sup>14</sup> atau masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “Bagaimana” berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.

---

<sup>13</sup> David Easton. 1965. *System Analysis of Political Life*. New York: John Willey & Sons Inc. Hlm. 21.

<sup>14</sup> Harold Lasswell. 1972. *Politics: Who gets what, when, how*. New York: The World Publication Comp.

## 5. Konflik

Menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.<sup>15</sup>

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai disebut *konflik*. Oleh karena itu menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Politik menurut peneliti adalah sebuah seni. Seni mempengaruhi orang lain, dengan menggunakan dua cara elegan dan frontal. Seni mempengaruhi orang lain dengan cara elegan seperti hegemoni, persuasi, pendekatan emosional dll dengan tujuan orang lain melakukan apa yang diinginkan oleh aktor politik. Sedangkan seni mempengaruhi orang lain dengan cara frontal seperti intervensi, peraturan yang mengikat, agresi sampai dengan peperangan.

---

<sup>15</sup> Paul Conn. 1971. *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*. New York: Harper & Row Publisher. Hlm. 42.

### C. Tinjauan tentang Perempuan

Berbicara tentang perempuan, secara langsung telah menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai *the other sex* yang sangat menentukan mode representasi sosial tentang status dan peran perempuan (Abdullah, 1997: 3). Perempuan adalah sebutan yang dipakai untuk jenis kelamin bukan lelaki. Meski perempuan dan lelaki berbeda secara biologis, akan tetapi konsep perempuan sesungguhnya tidak hanya berdasarkan jenis kelamin karena perempuan lebih dari sekedar tubuh yang bukan lelaki.

Asumsi yang digunakan feminis aliran eksistensi adalah *human nature* dan *human essence*. Manusia dipandang makhluk biologis yang mempunyai kemampuan berfikir (nalar). Dalam pandangan ini juga kondisi yang dialami perempuan lebih banyak ditentukan oleh faktor biologis seks. Konsep perempuan lahir dari serangkaian interaksi dan nilai yang mempengaruhi definisi perempuan tentang dirinya maupun definisi masyarakat tentang perempuan.

Pada kenyataannya memang hampir semua kelompok masyarakat telah menggunakan jenis kelamin sebagai salah satu kriteria pengorganisasian kehidupan mereka. Dalam hal ini, selain merancang serangkaian peran lintas jenis kelamin (peran yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan), setiap kelompok masyarakat telah merancang pula bagi tiap-tiap jenis kelamin. Pola inilah yang digunakan sebagai kerangka acuan untuk sosialisasi dalam masyarakat. Feminisme multikultural menyambut baik penekanan pada isu

“perbedaan”. Menurut feminisme multikultural, ketertindasan juga dapat berlaku dengan memperlakukan dengan persamaan.

Jenis peran tersebut baik peran yang bersifat feminin ataupun maskulin mempunyai keanekaragaman yang tak terbatas. Namun menurut kelaziman setiap kelompok masyarakat telah mempunyai sepasang peranan seks yang diakui dimana anggota masyarakat yang bersangkutan diharapkan mengikutinya dengan taat, sehingga pola tersebut bersifat tipikal. (Horton & Hunt, 1991).

Jenis peran yang bersifat feminin ataupun maskulin mempunyai perbedaan yang tidak hanya disambut baik oleh feminisme multikultural. Juga oleh Manu dan Angiras “Sesungguhnya, seorang perempuan yang membanggakan dirinya karena derajat keluarga ayahnya dan tidak mematuhi suaminya maka ia harus dihadapkan kepada Raja dan menjadi mangsah anjing-anjing dihadapan majelis-majelis rakyat banyak”. (Manu, 8-371).

“Tidak ada seorangpun di dunia ini yang mau memakan makanan yang ditawarkan oleh seorang perempuan yang tidak mematuhi suaminya. Perempuan yang tidak patuh kepada suaminya dicap sebagai seorang yang memperturutkan hawa nafsu”. (Angiras, 69). Hal ini juga diperkuat oleh feminisme lingkungan. Ekofeminisme dibangun berdasarkan asumsi inti hierarki yang saling berkaitan. Hierarki inti melibatkan manusia yang mendominasi semua bentuk kehidupan, yaitu laki-laki mendominasi perempuan.

Dasar pembagian peran jenis ini teracu pada konsep-konsep ideologis yang sesuai dengan sifat dan arti laki-laki dan perempuan, termasuk pengertian evaluatif tentang status relatif jenis kelamin tersebut (Sanderson, 1995:395). Dengan kata lain sebagai stereotip, konsepsi-konsepsi ideologis ini akan berperan sebagai standar untuk menentukan apakah perilaku individu sesuai atau tidak dengan jenis kelamin. Namun demikian, meski konsepsi ideologis berfungsi sebagai standar bukan berarti kemudian sebagai harga mati atau bersifat statis, akan tetapi berkemungkinan untuk berubah atau bersifat dinamis sesuai dinamika sejarah masyarakat yang bersangkutan. Konsepsi-konsepsi ideologis tentang laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian sering dikenal dengan istilah gender.

## **1. Konsep Gender**

*Gender* adalah perbedaan karakteristik, peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan/tuntutan zaman. Dengan kata lain, karena perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) maka dibedakan karakternya, perannya, statusnya, fungsinya.

*Gender* berbeda dengan jenis kelamin. *Gender* sering dikatakan sebagai jenis kelamin sosial: antara feminis dan maskulin. Sedangkan jenis kelamin bermakna perbedaan secara seksual antara laki-laki dan perempuan karena tubuhnya. Jenis kelamin lebih bersifat kodrati. Menjadi laki-laki dan perempuan tidak karena manusia menginginkan dan membentuknya tetapi karena telah ditentukan Tuhan.

Dengan demikian jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan, laki-laki akan tetap laki-laki, demikian pula sebaliknya tidak dapat dipertukarkan dimana saja dan kapanpun. Hal ini berbeda dengan gender, menjadi maskulin atau feminine adalah bentuk manusia. Perempuan menjadi berperan sebagai ibu dengan pekerjaan di dalam rumah tangga, karena masyarakat membentuk atau mengkonstruksikan seperti ini. Sebagai bukti bahwa hal ini membentuk atau konstruksi sosial dapat dilihat pada perbedaan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki di berbagai tempat.

Dimensi-dimensi ketimpangan atau ketidaksetaraan gender meliputi partisipasi, kontrol, manfaat, dan akses. Ketidaksetaraan dalam partisipasi berarti perempuan tidak dapat melakukan segala aktivitas kehidupan yang diinginkan tanpa kecuali, baik di dalam aktivitas produktif, reproduktif, maupun sosial. Ketidaksetaraan dalam hal akses berarti perempuan tidak memperoleh peluang terhadap berbagai aktifitas dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti tanah, alat-alat produksi, kredit, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ketidaksetaraan dalam hal akses juga berarti perempuan tidak dapat menikmati hak atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya.

Ketidaksetaraan dalam kontrol berarti perempuan tidak dapat menentukan secara mandiri tentang apa yang akan dia lakukan atau yang tidak dilakukan. Jika perempuan tidak dapat memutuskan secara mandiri apakah dia akan bekerja atau tidak, atau apakah hasil kerjanya akan dipergunakan, berarti perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri.

Ketidaksetaraan dalam manfaat artinya perempuan tidak dapat menikmati manfaat dari aktivitas yang dilakukan atau aktivitas pembangunan pada umumnya. Ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat menjadi sangat bermasalah ketika dikaitkan dengan pembagian kerja atas gender, yaitu pembagian kerja yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang menganggap bahwa perempuan cocok untuk jenis pekerjaan tertentu, demikian juga laki-laki.

Karena perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pemeliharaan anak dianggap cocok untuk perempuan sementara pekerjaan mencari nafkah dianggap cocok untuk laki-laki meskipun sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah. Selain itu, pembagian kerja atas gender juga disebabkan karena adanya pelabelan gender (*gender stereotyping*) yaitu pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori gender yang pada umumnya merugikan.

Sebagai contoh perempuan itu cengeng, emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif, sebaliknya laki-laki mandiri, tegas, kasar, agresif, dominan, kejam, dan sebagainya. Peran pencarian nafkah (produktif) cocok untuk laki-laki; peran reproduktif cocok untuk perempuan dan peran sosial dapat dilakukan laki-laki dan perempuan meskipun kecenderungannya laki-laki yang dominan karena aktivitas sosial dilakukan di luar rumah tangga.

Ketimpangan dalam pembagian kerja atas gender mengakibatkan munculnya banyak ketidakadilan gender yang terwujud dalam bentuk marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) perempuan, subordinasi perempuan atas laki-laki, stereotype gender, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda pada perempuan. Ketimpangan gender dalam pembagian kerja juga mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan yang pada umumnya dialami perempuan karena anggapan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, dan sebagainya sehingga ada status dan peran tertentu yang ditutup atau dibatasi untuk perempuan, termasuk di dalamnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

## **2. Faktor Penyebab Ketimpangan Gender**

Banyak ahli yang sudah mencoba menjelaskan faktor penyebab munculnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek. Feminisme liberal menyatakan bahwa rendahnya posisi dan peran perempuan dibandingkan laki-laki disebabkan kurangnya kesempatan dan pendidikan terhadap perempuan. Asumsi yang dikembangkan adalah bahwa apabila perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing, maka mereka akan berhasil dalam menyamakan posisi dan perannya dengan laki-laki.

Rousseau menyatakan bahwa tradisi feminisme liberal ini berkembang karena pemikiran-pemikiran yang berkembang menyatakan bahwa perempuan tidak lebih rasional dari laki-laki dan berdasarkan sifatnya maka pendidikannya dibatasi dan ditempatkan di ranah domestik. Sedangkan John Stuart Mill menyatakan bahwa

perempuan menjadi penurut dan sudi dikendalikan orang lain karena mereka selalu diajarkan bahwa kewajiban dan hakekat mereka adalah untuk menyangkal diri sendiri dan untuk tidak memiliki hidup mereka sendiri.

Menurut Wilson, teori ini sebetulnya merupakan bantahan dari teori nature yang menyatakan bahwa pembagian kerja seksual adalah sesuatu yang wajar, bersumber pada perbedaan struktur genetik dari laki-laki dan wanita. Senada dengan pernyataan Wilson, Freud dan From juga menyatakan bahwa pembagian kerja secara seksual berkaitan dengan struktur anatominya (dalam Budiman, 1981).

Atas dasar asumsi bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan terbatasnya akses atau peluang perempuan untuk bersaing dengan laki-laki, maka dikembangkan program Women In Development (WID) yaitu menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti ketrampilan, pendidikan, kebijakan yang dapat membuat perempuan mampu berpartisipasi. Pendekatan yang berasumsi bahwa keterbelakangan perempuan itu terletak pada perempuan itu sendiri, membuat mereka tidak mempersoalkan ideologi patriarki yang menjadi penyebab diskriminasi sebagaimana dinyatakan feminis radikal.

Analisis feminis liberal mendapatkan banyak kritik dari sejumlah feminis lainnya. Bagi feminis radikal, penyebab penindasan terhadap perempuan berakar pada jenis kelamin laki-laki beserta ideologi patriarki. Jadi, dengan demikian 'kaum laki-laki' secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan (Jaggar, 1977). Patriarki merupakan sistem hierarki seksual dimana laki-laki memiliki

kekuasaan superior dan privilege ekonomi dianggap sebagai pokok masalah. Bagi mereka, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki. Semboyan mereka adalah *personal is political*.

Akan tetapi analisis feminis radikal ini dianggap ahistoris oleh feminis Marxist karena hubungan gender direduksi pada biologi. Bagi feminis Marxist, penindasan terhadap perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi. Engels, menyatakan bahwa sejarah jatuhnya status perempuan disebabkan karena perubahan organisasi kekayaan yaitu munculnya era hewan piaraan, petani menetap, yaitu suatu masa awal penciptaan surplus adalah dasar munculnya *private property* yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk *exchange*. Oleh karena itu, laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik sementara perempuan direduksi menjadi bagian dari properti belaka.

Berbeda dengan analisis kaum feminis liberal yang lebih memfokuskan perempuan, analisis feminis Marxis lebih tertuju pada sistem kapitalisme. Penindasan terhadap perempuan dilanggengkan sistem kapitalisme, diantaranya melalui mekanisme 'eksploitasi pulang ke rumah', yakni suatu proses yg diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi oleh kapitalis selanjutnya pulang ke rumah dan terlibat dengan suatu hubungan kerja dengan istri mereka.

Dalam hal ini, perempuan diposisikan demi tujuan akumulasi kapital, dan bermanfaat untuk mereproduksi buruh murah. Oleh karena itu masuknya perempuan sebagai buruh akan diupah rendah lebih rendah dari laki-laki. Dalam struktur sosial ekonomi yang kapitalis, perempuan hanya sebagai tenaga kerja cadangan yang murah. Kalaupun perempuan diposisikan di dalam rumah bukan karena biologis perempuan yang melahirkan anak tetapi karena secara struktur sosial ekonomi tidak menguntungkan. Posisi perempuan di dalam rumah dan laki-laki sebagai pencari nafkah dengan demikian merupakan pembagian kerja yang dibutuhkan masyarakat dan diciptakan untuk keuntungan seluruh masyarakat.

Perempuan harus tinggal di rumah karena berguna untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sementara itu suami mengembangkan kariernya di luar rumah. Isteri boleh bekerja di luar rumah tetapi tidak merupakan kariernya, karena apabila antara suami dan isteri berkarier di luar rumah maka akan muncul persaingan yang akan merusak hubungan suami dan istri. (Parson dalam Budiman, 1981). Bagi feminis Marxist, laki-laki bukan akar permasalahan tetapi kapitalisme itulah akar permasalahannya.

Feminis Marxist memperoleh kritik dari feminis Sosialis. Analisis mereka adalah sistesis antar metode historis dan ide *personal is political*. Penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi Marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karenanya, analisis *patriarki* perlu dipadukan dengan analisis kelas. Dengan

begitu, kritik terhadap eksploitasi kelas di suatu sistem kapitalisme pada saat yang sama harus disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan.

Penindasan bagi mereka bisa menimbulkan kesadaran revolusi, tetapi bukan kesadaran *women as sex* model feminis radikal. Ketidakadilan oleh feminis Sosialis dipandang sebagai manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu yang diperangi adalah visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun di atas bias gender.

Kritik feminis Sosialis terhadap feminis liberal terletak pada anggapan bahwa ada korelasi positif antara partisipasi dalam produksi dan publik serta status perempuan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu tetapi tidak selalu menaikkan statusnya. Rendahnya partisipasi memang berkorelasi dengan rendahnya status perempuan, tetapi keterlibatan perempuan juga mengakibatkan beban ganda perempuan karena mereka tetap ter subordinasi laki-laki. Akibatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi membawa perempuan pada antagonisme seksual daripada menaikkan statusnya.

Melengkapi pemikiran feminis liberal, pola pemikiran gerakan feminis radikal menyatakan bahwa sistem patriarkhilah penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan. Penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi tubuh, heteroseksisme, dan kelasisme menurut feminisme radikal terjadi secara signifikan dengan penindasan patriarkhis. Firestone dalam Jane dan Helen (1996)

menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan didasarkan atas biologis perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi tergantung laki-laki untuk bertahan hidup. Untuk mempertahankan dominasi, laki-laki melakukan terorisme seksual (Brownmiller dan Will dalam Jane dan Helen, 1996). Selain itu dipergunakan kekerasan dan ancaman, meniadakan kontrol perempuan atas tubuh dan kehidupannya sendiri (Sheffield dalam Jene dan Helen, 1996).

Feminis Kontemporer menyatakan bahwa pembagian kerja secara seksual dipengaruhi faktor-faktor sosial ekonomi yang didasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat, serta faktor ideologi atau sistem *patriachat*. Dalam hal ideologi, Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan kekuasaan hegemoni, karena perempuan sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Laki-laki tidak perlu menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa perempuan tunduk padanya

Bhasin (1996) memberikan penjelasan bahwa dominasi laki-laki sebagai penguasa atas perempuan disebabkan karena budaya patriarkhi. Budaya ini mengatur pembagian kerja secara seksual yang menempatkan laki-laki di luar rumah sebagai pencari nafkah dan perempuan di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, dan melegitimasi laki-laki sebagai penguasa atas perempuan. Implementasi dari dominasi tersebut adalah pada kepemilikan alat produksi, akses terhadap informasi yang lebih banyak pada laki-laki semakin memperkuat posisi laki-laki sebagai penguasa. Pada prinsipnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya

patriarkhi adalah nilai laki-laki lebih tinggi dari perempuan; laki-laki sebagai pencari nafkah; dan superior dalam pengambilan keputusan.

Budaya patriarkhi ini semakin kuat karena banyak kalangan yang mengaitkannya dengan agama, seperti laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pada akhirnya budaya patriarkhi menjadi ideologi, karena pada akhirnya budaya patriarkhi menjadi system yang sangat sulit diubah, dan diterima begitu saja. Tjiptosubono (dalam Muthali'in, 2001) menggambarkan budaya patriarkhi dalam masyarakat Jawa dimana isteri ibarat jempol, artinya mengabdikan sepenuhnya pada suami, ibarat telunjuk yaitu menurut pada suami, ibarat jari manis yaitu bermanis muka pada suami, ibarat jejetik artinya teliti dan rajin. Dengan budaya patriarkhi maka perempuan menjadi tergantung pada suami atau laki-laki (Fakih, 1998), ijin dari suami sangat penting bagi perempuan yang berkarier atau mencari nafkah.

Ada dua hal yang penting dalam melihat budaya patriarkhi:

### **1. Differensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin**

Banyak ahli antropologi, sosiologi dan ekonomi mengasumsikan bahwa diferensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah pada adanya peranan yang lebih besar atau menyeluruh dari pada wanita dalam pekerjaan rumah tangga (reproduksi) dan pekerjaan laki-laki dalam pekerjaan produktif. Walaupun dalam kenyataannya banyak juga perempuan yang terlibat dalam kegiatan pencarian nafkah, seperti dalam pertanian, kerajinan tangan, industri besar dan kecil (White, 1976; Hart, 1978; Cernea, 1978, Boserup, 1984).

Pembagian peran ini menurut Hidayati (dalam Jurnal Perempuan NO 16), diciptakan oleh masyarakat patriarkhi dengan tujuan mempertahankan dominasi laki-laki. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa banyak perempuan yang setelah menikah tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya dengan alasan tugas utamanya sebagai seorang isteri adalah mengerjakan tugas-tugas domestik seperti mengatur rumah tangga, memasak mengurus suami, dan lainnya. Setelah keluarga itu mempunyai anak, maka tugasnya bertambah yaitu mengurus anak.

Anggapan bahwa anak laki-laki penerus garis keluarga, sangat tidak menguntungkan anak perempuan. Selain tidak diuntungkan karena hal tersebut, pola pengasuhan pada anak perempuan yang cenderung menciptakan sosok perempuan yang penyayang, patuh, tidak egois, lembut, menjadi tidak menguntungkan bagi perempuan yang berusaha mengekspresikan keinginannya atau kebutuhannya.

Sebagai contoh hasil penelitian Purnama 2001 (Jurnal Perempuan No 17) menjelaskan bahwa adat Batak juga mengenal diferensiasi seksual yang ketat, sehingga walaupun pendidikan perempuan Batak sudah ada peningkatan, tetapi perempuan tetaplah berada dibelakang layar (tidak diperbolehkan ikut dalam perundingan apalagi berpendapat, dan tidak berhak memperoleh warisan). Tetapi di balik diskriminasi yang ada, perempuan Batak sangatlah tangguh, banyak janda yang berbekalkan pendidikan minimum bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.

## **2. Distribusi Kekuasaan (Power) antara Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga.**

Blood dan Wolfe (1960) menyatakan bahwa aspek penting dalam struktur keluarga adalah posisi anggota keluarga karena distribusi dan alokasi kekuasaan, kemudian berikutnya adalah pembagian kerja dalam keluarga. Kekuasaan dinyatakan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu bisa sama nilainya (*equally*) antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri) atau tidak sama nilainya.

Hubungan kekuasaan itu dapat dilihat pada seberapa jauh masing-masing jenis kelamin menguasai sumber-sumber yang sangat berharga (tanah, tenaga kerja, bahan makanan, uang, informasi). Hubungan kekuasaan juga dapat dilihat dengan menganalisis ada tidaknya diferensiasi dalam perilaku dan ideologi. Diferensiasi perilaku laki-laki dan perempuan adalah menunjuk pada peranan yang umumnya dilakukan masing-masing jenis kelamin.

Diferensiasi dalam ideologi menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan menganggap bahwa dirinya masing-masing secara mendasar berbeda; dalam hal ini masing-masing diharapkan memiliki nilai, norma, tujuan dan sebagainya. Pada akhirnya dua kutub perbedaan dalam distribusi kekuasaan dapat diperoleh, satu kutub pada hubungan kekuasaan yang seimbang (*balanced power*) dan tidak seimbang (*unbalanced power*).

Hubungan kekuasaan tersebut seringkali diterima apa adanya oleh masyarakat karena dianggap sebagai wewenang masing-masing (*authority*). Wewenang keluarga (*family authority*) pada umumnya diatur kebudayaan dalam masyarakatnya. Dalam budaya *patriachat*, suami dan isteri menganggap wajar bahwa suamilah berperan mengambil keputusan. Tetapi kenyataannya banyak variasi lain, sehingga menurut Blood dan Wolf ada faktor lain yang mendorong suami isteri mengambil keputusan. Rogers menyatakan bahwa variable itu adalah sumberdaya (*resources*) pribadi.

Pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang muncul sebagai alat untuk mempertahankan fungsi struktur sosial telah mengakibatkan terjadinya dominasi laki-laki atas perempuan yang di dalamnya terdapat hubungan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dimana perempuan ditempatkan di dalam rumah tangga pada akhirnya membuat dunia publik termasuk politik adalah dunia laki-laki.

Pembagian kerja yang secara efektif disosialisasikan baik di dalam keluarga, sekolah ini merugikan perempuan karena menutup akses perempuan dalam berpolitik. Meskipun demikian, kekhawatiran juga muncul ketika peluang bagi perempuan untuk berpolitik mulai terbuka, karena ketika banyak perempuan yang tidak bisa memasuki dunia publik maka yang disalahkan adalah perempuan (perempuan tidak tertarik pada politik).

Ketidaktertarikan perempuan dalam politik selain disebabkan konstruksi budaya yang paternalistik, juga disebabkan karena konstruksi budaya tersebut seringkali memarjinalkan atau mengucilkan perempuan dari politik formal. Bagi perempuan, politik dianggap penuh persaingan, kejam, dan sedikit perempuan yang tahan untuk itu. Banyak perempuan yang merasa tidak mengetahui "aturan permainan" untuk dapat berhasil di politik dan lebih baik menjauh darinya.

Partisipasi perempuan lemah, karena meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka minim ketrampilan dan seringkali lebih menjadi perimbangan gender daripada kekuatan politik yang sesungguhnya. Institusi dan proses-proses yang mendorong, memfasilitasi atau mendukung partisipasi politik perempuan sebagai sebuah bidang yang penting dalam kehidupan publik pun masih terbatas (IDEA, 1999).

Hal ini disebabkan oleh budaya dan etos politik formal sangat diwarnai oleh gaya hidup laki-laki yang mempunyai karakter agresif dan kompetitif. Politik maskulin ini dapat dilihat pada dua aspek. dan etos politik formal sangat diwarnai oleh gaya hidup laki-laki yang mempunyai karakter agresif dan kompetitif. Politik maskulin ini dapat dilihat pada dua aspek.

Aspek pertama, politik yang terdapat pada masyarakat tradisional dilihat sebagai hubungan *patron clien* antara bapak dengan anak dan keluarga dimana bapak adalah pelindung dan pengambil keputusan. Oleh karenanya perempuan adalah yang dilindungi dan pelaksana atau bukan pengambil keputusan. Jadi hubungan

*patron clien* menjadikan politik ditangan laki-laki (Nelson dan Chowdhury (ed), dalam Arivia, 1999).

Aspek maskulin yang kedua adalah rasa persaudaraan (*fraternalisme*) di dalam pembentukan institusi politik formal berdasarkan perikatan laki-laki (*male bonding*). Di dalam *fraternalisme*, arena politik memiliki member laki-laki, dengan laki-laki sebagai pembuat aturan main sedangkan perempuan adalah makhluk anti politis. Untuk Indonesia hal ini terlihat pada posisi dan peran perempuan di organisasi wanita seperti PKK, Dharma Wanita.

Di dalam situasi seperti tersebut di atas, maka masuknya perempuan dalam aktivitas politik hanya di dasarkan atas pertimbangan kerja sosial (*charity*) dan bukan *political will* (kehendak politik). Kehadiran perempuan di lembaga parlemen berkaitan dengan profesi dan karir suami (Karam dalam Arivia). Bahkan Gadis Arivia menyatakan bahwa masuknya perempuan parlemen adalah "kecelakaan" atau kegiatan sampingan yang sejak semula tidak dianggap sebagai profesi yang akan dituju dan diperjuangkan. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau mengapa perempuan anggota parlemen di Indonesia tidak memandang posisi dan perannya sebagai pekerjaan politisi dengan dedikasi dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah ideologi gender. Ideologi gender yang termanifestasikan dalam sistem nilai, norma dan *stereotype* tentang perempuan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bagaimana orang memandang perempuan dan ruang gerakanya. Ideologi gender terutama ideologi

tentang seksualitasnya yaitu yang memandang posisi maupun hubungan perempuan dengan laki-laki atau dengan lingkungannya dalam struktur sosial yang ada, menurut Turner telah mengalami proses institusionalisasi dan internalisasi sehingga tersusunlah sistem sosial budaya, yang menurut kaum fungsionalis akan bertahan lama apabila anggotanya menjalankan peran-peran sosial sesuai dengan harapan peranan (*role expectation*) yang ada di dalam masyarakat.

Sedangkan menurut kaum strukturalis, hal ini disebabkan karena ada pemaksaan kelompok yang berkuasa atas dasar kepentingan sehingga ideologi gender dijadikan sebagai ideologi yang dominan. Straus menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam posisi biner dimana perempuan dikatakan berada dalam posisi emosional, percaya tahayul, dan berperan dalam pengasuhan anak, sebaliknya laki-laki rasional, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan dalam pencarian nafkah.

Ortner menyatakan bahwa dalam klasifikasi biner maka ciri utama adalah perempuan menempati posisi lebih rendah dari laki-laki. Pendekatan pascastrukturalis seperti Gramsci menyatakan bahwa walaupun memang ada nilai-nilai tertentu yang hegemonis karena pengalaman hidup atau subyektivitas yang berbeda-beda, ideologi gender selalu menjadi sumber pertentangan (dalam Saptari dan Holzner, 1997)

Oleh karena masyarakat tidak statis, dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat tidak selalu berimbang atau dalam keadaan status *quo*, ideologi pun berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Formulasi ideologi seringkali mempunyai daya jangkau dan daya kendali yang tidak merata mengikuti diferensiasi sosial dalam masyarakat, dan perbedaan kepentingan dari institusi dalam negara. Walaupun negara dilihat sebagai kekuatan penting yang menentukan bentuk dan arah ideologi maupun *discourse* tentang aturan-aturan tertentu, negara bukan kekuatan yang monolit. Dalam beberapa institusi, tekanan bisa pada aspek yang lain, sesuai dengan tujuan yang berbeda-beda pula.

Oleh karena itu, formulasi ideologi harus sesuai dengan konteks sosialnya, dari kelompok atau individu yang mendukungnya dan dari struktur kekuasaan maupun mekanisme kekuasaan yang melestarikannya. Pendefinisian perempuan sebagai ibu dan pendidik bangsa, penggoda, sumberdaya manusia yang teliti dan ulet, seringkali digunakan secara bersama-sama atau secara bergantian dalam konteks yang berbeda-beda untuk tujuan yang berbeda.

Ideologi gender dapat dilihat dalam bentuk nilai "pemingitan" (*seclusion*), pengucilan dari bidang-bidang tertentu (*exclusion*), nilai feminitas perempuan. Sebagai contoh, Hidayat (dalam Poerwandari dan Surtiati, 2000) menyatakan bahwa ada banyak pembatasan pada perempuan seperti dalam pendidikan, pencarian nafkah yang membuatnya terdiskriminasi dari laki-laki, yang diperkuat dengan ajaran agama yang bertentangan dengan aspirasi perempuan dalam pendidikan, pencarian nafkah, dan kemandirian.

Terutama, batasan tentang kodrat merupakan kesulitan bagi perempuan untuk maksimal dalam mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Selalu dikatakan bahwa "perempuan boleh berkarier sepanjang tidak menyalahi kodrat". Ideologi gender ternyata tidak hanya menyulitkan perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya, tetapi juga merugikan perempuan seperti terlihat pada terjadinya marginalisasi perempuan, domestikasi, dan pengiburumahtanggaan.

Kajian-kajian teoritik di atas dapat dijadikan landasan teoritis untuk melihat permasalahan yang terjadi pada perempuan terutama tentang partisipasi dan persepsi politik perempuan pada Etnik Lampung. Melalui perspektif gender dapat dipahami bahwa keberadaan masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan yang timpang atau tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang timpang memanifestasi dalam sikap dan perilaku individu yang bias gender dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih memprihatinkan lagi ketika sikap dan perilaku tersebut telah terlegitimasi oleh budaya masyarakat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat.

#### D. Alur Kerangka Dalam Pemikiran

